



Implementasi Konsep *Darul 'Ahdi Wa Syahadah* Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Muhammad Yusril Indra Syahputra¹

¹Magister Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

E-mail: Lain9684@gmail.com¹

Article Info

Article history:

Received September 20, 2025

Revised September 29, 2025

Accepted Oktober 02, 2025

Keywords:

Implementation Of Concept,
Darul 'Ahdi Wa Syahadah,
Nation and Nation.

ABSTRACT

The Pancasila State as Dar Al-'Ahdi (an agreement) is a concept that acknowledges that the existence of the Republic of Indonesia State on the basis of the pancasila state is an agreement of all elements of the nation, language, and religious background. The purpose of this article is to know the concept of Darul' Ahdi Wa Syahadah, in addition to it also know the implementation of the concept Darul' Ahdi wa syahadah in various fields in the life of nations and nations. Thus, this article will provide a benefit where when there are challenges faced in implementing the concept, there are definitely solutions to the challenge. Furthermore, it can give a picture to the public by applying the concept of Darul 'Ahdi wa Syahadah in the life of nations and nations, of course the lives of the people can live in harmony, respect each other, and together build the nation towards progress and prosperity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 20, 2025

Revised September 29, 2025

Accepted Oktober 02, 2025

Keywords:

Implementasi Konsep, *Darul 'Ahdi Wa Syahadah*, Berbangsa dan Bernegara.

ABSTRAK

Negara Pancasila sebagai *Dar Al-'Ahdi* (sebuah kesepakatan) adalah sebuah konsep yang mengakui bahwa eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa, bahasa, dan latar belakang agama. Tujuan artikel ini yaitu mengetahui konsep *Darul' Ahdi Wa Syahadah*, selain itu juga mengetahui implementasi konsep *Darul' Ahdi Wa Syahadah* di berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengimplementasian konsep *Darul' Ahdi Wa Syahadah* di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara seperti halnya pada bidang hukum, Pendidikan, sosial budaya dan politik. Dengan itu, artikel ini akan memberikan manfaat dimana ketika terdapat tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan konsep tersebut, tentunya terdapat solusi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain itu juga, dapat memberikan gambaran kepada publik dengan menerapkan konsep *Darul 'Ahdi wa Syahadah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kehidupan masyarakat dapat hidup harmonis, saling menghargai, dan bersama-sama membangun bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Muhammad Yusril Indra Syahputra
Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: Lain9684@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu kontekstualisasi terpenting dari gagasan fundamental Islam Berkemajuan yang diupayakan Muhammadiyah adalah *Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah*. Artinya, Indonesia yang sebenarnya merupakan Negara Pancasila, dipandang sebagai negara perjanjian (*dar al-‘ahd*) dan persaksian (*al-shahadah*). Hal itu bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para aktivis Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan persyarikatan, sebagai fondasi pertahanan ideologis, sebagai alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme kebangsaan (Bachtiar, H. 2019).

Menurut dokumen resmi Muhammadiyah, organisasi tersebut memandang bahwa Republik Indonesia yang berdiri di atas landasan Pancasila (Negara Pancasila) merupakan *Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah*. Negara Pancasila disebut sebagai *dar al-‘ahd* (negara perjanjian atau negara kesepakatan), karena berdirinya di tahun 1945 dan perumusan dasar-dasarnya dihasilkan dari sebuah konsensus nasional. Lantas kemudian, penambahan *dar al-shahadah* (negara persaksian) setelah *dar al-‘ahd*, bermakna bahwa implementasi mengenai (nilai-nilai luhur) Pancasila memerlukan peran aktif Muhammadiyah. Karena itulah maka Muhammadiyah akan menyaksikan dirinya sebagai bagian dari Indonesia dan menjadi Indonesia itu sendiri (Muhammadiyah adalah Indonesia) (Bachtiar, H. 2019).

Berkaitan erat dengan gagasan *dar al-‘ahd*, secara historis, ketika Pancasila direformulasikan melalui konsensus

nasional, para tokoh bangsa yang memiliki peran begitu penting pada saat itu, terutama sebagian dari mereka adalah para elit Muhammadiyah yang membawa serta aspirasi kaum Muslim, memahami bahwa Pancasila selaras dan berjalan beriringan dengan ajaran-ajaran Islam. Rumusan Masalah Adapun pertanyaan dalam artikel ini adalah sebagai berikut. a) Bagaimana konsep *Darul’ Ahdi Wa Syahadah*? b) Bagaimana implementasi konsep *Darul’ Ahdi Wa Syahadah* di berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Tujuan Penelitian memiliki dua tujuan untuk Mengetahui konsep *Darul’ Ahdi Wa Syahadah* dan Mengetahui implementasi konsep *Darul’ Ahdi Wa Syahadah* di berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat penelitian ini secara akademis adalah memberikan informasi mengenai konsep *Darul’ Ahdi Wa Syahadah* beserta asal-usulnya, serta menjelaskan pengimplementasiannya dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada publik bahwa dengan menerapkan konsep *Darul’ Ahdi Wa Syahadah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat dapat hidup secara harmonis, saling menghargai, serta bersama-sama membangun bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan, sekaligus menambah pengalaman bagi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah.



Metode Penelitian

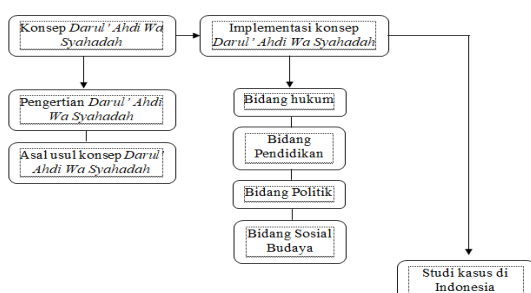
Metode yang digunakan adalah studi literatur yang berfokus pada tinjauan dan sintesis dari berbagai sumber terpublikasi mengenai implementasi konsep darul 'ahdi wa syahadah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Fink (2019) studi literatur adalah proses sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis karya penelitian yang sudah dipublikasikan dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang spesifik.

Konteksnya adalah melakukan penelusuran dan analisis literatur akademik terkait, dengan tujuan menyediakan tinjauan komprehensif mengenai implementasi konsep darul 'ahdi wa syahadah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencarian dan penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik terkemuka, seperti buku, jurnal, dan beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai landasan penulis untuk membuat tulisan ini.

Literatur yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendeskripsikan implementasi konsep darul 'ahdi wa syahadah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa bidang seperti halnya hukum, Pendidikan, sosial budaya, dan politik. Setelah itu dari setiap teknik juga dikaji untuk memperkaya pemahaman pembaca. Hasil tinjauan literatur ini disintesis dan disajikan secara sistematis dalam tulisan ini.

Kerangka Teori

Kerangka teori digambar seperti berikut:



Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Darul' Ahdi Wa Syahadah

a. Pengertian Darul' Ahdi Wa Syahadah

Al-ahdi merupakan penegasan bahwa Indonesia lahir karena adanya kerelaan di antara para pendiri bangsa untuk menerima seluruh kemajemukan bangsa. Bukan hanya *consensus*, negara Pancasila juga merupakan *dar al-syahadat* atau “negara kesaksian” atau “negara perjanjian” (Zulfikar, I. 2019). Darul ahdi artinya negara tempat kita melakukan *consensus nasional*. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia (Kusumawati, Y. 2019). Jadi, Darul Ahdi yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah adalah untuk memberi lebel hubungan umat Islam sebagai suatu komunitas yang berkaitan dengan kelompok-kelompok lainnya. Hubungan ini bersifat bilateral dengan pengertian adanya kesepakatan di antara kelompok, yakni seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyepakati terbentuknya sebuah negara.

Darul Ahdi adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan diantara seluruh rakyat warga negara Kesepakatan atau perjanjian ini bersifat politis karena ia berhubungan dengan kehidupan bernegara. Muhammadiyah menegaskan bahwa adanya negara Pancasila itu merupakan satu produk dari kesepakatan atau satu kompromi dari para tokoh pendiri bangsa Sehingga adanya Indonesia ini merupakan satu hasil dari gentlemen agreemant dari para pendiri bangsa, terutama mereka yang secara langsung terlibat dalam proses-proses penyusunan dasar negara dan undang undang dasar, baik dalam lembaga BPUPKI maupun lembaga PPKI. Kesepakatan itulah yang melahirkan Indonesia seperti sekarang ini (Suasana, E. S. 2019). Sedangkan konsep darul syahadah (negara persaksian) lahir dari



pemikiran bahwa umat Islam bertanggung jawab dengan argumen-argumen termasuk teologis yaitu tentang “kesaksian”, terutama sebagai ummatan wasathan (umat tengahan).

b. Asal Usul Konsep

Sejak awal berdiri, Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang sarat dengan dinamika yang cukup menguras tenaga. Dalam kehidupan kebangsaan, khususnya pada era reformasi, rumusan Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua menyebut bahwa Muhammadiyah menjadi pilar penting masyarakat madani (*civil society*) dan memelopori era baru Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah tersebut menegaskan komitmen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta konsisten dalam mengintegrasikan ke-Islam-an dan keIndonesia-an.

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam kosep Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah*. Secara harfiah, rumusan ini bermakna Negara Pancasila berdasarkan kesepakatan dan kesaksian (pembuktian). Muhammadiyah berpandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Muhammadiyah berpandangan Pancasila adalah hasil rumusan yang Islami. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, hubungann individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan

kemakmuran. Melalui proses integrasi inilah, umat Islam diharapkan mampu menjadi kekuatan yang dapat diteladani secara kualitas, bukan sekadar kuantitas.

Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi* (sebuah kesepakatan) adalah sebuah konsep yang mengakui bahwa eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa, bahasa, dan latar belakang agama. Karena Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa, Muhammadiyah berpandangan Pancasila merupakan bentuk final sebagai ideologi negara yang tidak perlu lagi dipersoalkan atau bahkan diganti dengan dengan ideologi lainnya. Bahkan dalam konsep tersebut Muhammadiyah dengan tegas menyatakan bahwa segala upaya yang ingin mengubah bentuk negara Pancasila adalah bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Sementara dalam pemaknaannya sebagai *Dar Al-Syahadah* (kesaksian atau pembuktian), Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa, terlebih umat Islam untuk membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah mendorong adanya persaingan yang sehat dalam mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi terbaik yang dimiliki masing-masing pihak. Persaingan yang sehat dimaknai sebagai prinsip *fastabiq al-khairat* sebagaimana jargon yang hidup di kalangan Muhammadiyah.

Menurut Abdul Mu’thi, pandangan Negara Pancasila sebagai *Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah*, berangkat dari tiga latar belakang utama. *Pertama*, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa, secara ideologis belum merumuskan secara eksplisit dan membuat



satu penjelasan akademik mengenai konsep Negara Pancasila. *Ketiga*, ada sebuah pandangan yang berkembang, di mana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu sendiri (Arif, D. B., & Aulia, S. S. 2017).

2. Implementasi Konsep Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a. Implementasi di Bidang Hukum

Implementasi dalam bidang hukum mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada di Indonesia mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Muhammadiyah berperan aktif dalam mengadvokasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif serta berkontribusi dalam proses legislasi untuk memastikan hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 telah berstatus Badan Hukum. Dengan Badan Hukum tersebut Persyarikatan Muhammadiyah selain memperoleh kepercayaan dan pengakuan yang sah baik pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan pada pendudukan Jepang maupun setelah Indonesia merdeka dibawah Pemerintahan Republik Indonesia, sekaligus memiliki landasan yuridis yang sangat untuk bergerak menjalankan usahanya diberbagai bidang kehidupan. Kedudukan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tersebut berlaku secara menyeluruh di lingkungan Persyarikatan, termasuk bagi Aisyiyah organisasi otonom lainnya, amal usaha, dan kelembagaan lainnya yang berada di bawah induk Persyarikatan Muhammadiyah yang memerlukan payung hukum resmi untuk berbagai kepentingan dan kegiatan (Muhammadiyah, P. P. 2013).

b. Implementasi di Bidang Pendidikan

Sejak awal, Muhammadiyah telah menerima Pancasila. Kini, melalui konsep

Dar al-Ahdi Wa al-Syahada, Muhammadiyah mengimplementasi nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diintegrasikan dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) (Muthmainnah, Y. 2021).

Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah wajib pada beberapa kampus. Muhammadiyah memiliki Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang terdiri atas empat pilar yakni penguatan al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai kampus yang memegang teguh nilai-nilai Islam dan menjadikannya sumber pengetahuan dan perilaku, maka AIK menempati pilar pertama dalam Catur Dharma tersebut. Wujud dari pilar pertama adalah integrasi seluruh mata kuliah dengan nilai-nilai keislaman, termasuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Melalui mata kuliah ini, selain memberikan pemahaman Pancasila sebagai Dasar Negara, juga menumbuhkan pemahaman bahwa tidak ada yang berseberangan antara Pancasila dan Islam.

c. Implementasi di Bidang Sosial Budaya

Dalam perspektif sosial, tantangan yang dihadapi karna perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin maju dan berkembang problem yang dihadapi juga akan semakin kompleks (Suasana, E. S. 2019). Implementasi konsep "Darul 'Ahdi wa Syahadah" menekankan pentingnya kerjasama dan toleransi antarumat beragama. Muhammadiyah mengajarkan bahwa negara Pancasila adalah hasil konsensus nasional yang harus dihormati dan dipertahankan oleh semua elemen masyarakat, termasuk umat Islam. Hal ini berarti setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa.



Muhammadiyah telah membangun infrastruktur bangsa yang berbentuk filantropi. Hal tersebut berbasis pada komitmen Muhammadiyah untuk membentuk kesalehan religius sebagai kunci kesatuan bagi kemakmuran bangsa. Gerakan-gerakan yang dilakukan Muhammadiyah diprioritaskan untuk mengembangkan Kebajikan kemanusiaan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik bagi kepentingan publik. Berbagai layanan Muhammadiyah sebagai diversifikasi dakwah yang bersifat kemanusiaan, diantaranya LAZIZMU dan MDMC. LAZIZMU dan MDMC merupakan dua diantara gerakan sosial Muhammadiyah yang secara praksis ikut serta dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan sejahtera, sebagaimana dalam ciri kepribadian Muhammadiyah yang kesembilan; Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah (Astutik, A. P. 2019).

d. Implementasi di Bidang Politik

Dalam perspektif politik, banyak tantangan yang di hadapi mulai dari maraknya fenomena politik yang mengabaikan etika, disertai dengan semangat pragmatisme yang menonjol. Kepentingan politik jangka pendek lebih dikedepankan ketimbang kepentingan jangka panjang, terutama yang menyangkut keberlangsungan hidup bersama dalam sebuah negara yang maju, adil dan bermartabat. Idiologi dan agama sekedar menjadi jargon yang dijual untuk kepentingan meraih kekuasaan (Suasana, E. S. 2019).

Ijtihad Politik Muhammadiyah sudah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka atau pada masa awal kehadiran Muhammadiyah. Kontribusi persyarikatan ini mempunyai sifat kontinuitas, yaitu kemampuan untuk selalu memberikan peran kesejarahan yang bersifat futuristik

tidak saja bagi dirinya sendiri namun juga bagi lingkungannya yang lebih luas. Peran kesejarahan tersebut berarti bahwa Muhammadiyah selalu memberikan torehan tinta penting dalam setiap episode perjalanan bangsa dan negara. Dalam kurun waktu sejak berdirinya hingga sekarang Muhammadiyah sudah melewati banyak Era sejarah, Kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi dan pasca reformasi. Memasuki era reformasi Muhammadiyah mencoba untuk menjawab tantangan dunia yang bergerak secara dinamis khususnya Indonesia. Agar Indonesia mampu menjawab tantangan dunia tanpa kehilangan identitasnya sebagai Negara Pancasila.

3. Studi Kasus

(Contoh-contoh implementasi konsep Darul 'Ahdi Wa Syahadah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari negara-negara tertentu)

Konsep *Darul 'Ahdi Wa Syahadah* merujuk pada pemahaman bahwa suatu negara adalah tempat di mana umat Islam hidup dalam perjanjian (*darul 'ahdi*) dan bersaksi (*darul syahadah*) terhadap keadilan, perdamaian, dan moralitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Konsep ini dapat diterapkan dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim atau yang memiliki populasi Muslim signifikan, seperti Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, yang mendasarkan kehidupannya pada Pancasila dan UUD 1945. Meskipun bukan negara Islam, nilai-nilai Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik.

Kegiatan sosial berbasis Islam di Indonesia merupakan salah satu wujud nyata pengimplementasian konsep *Darul 'Ahdi Wa Syahadah*. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan sosial. Muhammadiyah tidak hanya fokus pada



aspek keagamaan, tetapi juga aktif dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Muhammadiyah sebagai agensi pembangunan peradaban memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang ‘berkemajuan’ pula. Pemikiran keagamaan haruslah diintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas sosial demi menjamin bahwa hal tersebut berdaya guna bagi kemanusiaan, terutama bagi golongan lemah dan mereka yang termarginalkan (*mustad'afin*) (Bachtiar, H. 2019).

4. Analisis dan Pembahasan

Tinjauan terhadap implementasi konsep Darul Ahdi Wa Syahadah di berbagai bidang di Indonesia memiliki beberapa aspek penting:

a. Bidang Hukum

1. Pancasila sebagai Jalan Hukum: Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah menegaskan komitmen Islam dan Indonesianisme. Darul Ahdi berarti negara kesepakatan, sedangkan Wa Syahadah berarti negara saksi. Dalam arti luas, Pancasila sebagai dasar hukum, berfungsi sebagai panduan bagi setiap warga negara dalam berinteraksi dengan dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia.
2. Implementasi nilai Pancasila: Nilai-nilai Pancasila tentang kesetaraan, demokrasi, dan keadilan tercermin dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum pidana, hukum sipil, dan hukum administratif. Misalnya, Pancasila, sebagai alat untuk menyatukan bangsa Indonesia, menjadi negara moral dan agama yang diisi dengan nilai-nilai ilahi dan kemanusiaan.
3. Pembangunan dan Dinamika: Konsep ini memerlukan penyesuaian dan pengembangan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi, yang

menuntut orientasi ke arah kualitas, daya saing, dan persaingan, menuntut bahwa rakyat Indonesia memiliki karakter kompetitif, dinamis, progresif, dan superior yang disertai dengan ketekunan dalam menunjukkan identitas bangsa.

b. Bidang Pendidikan

1. Implementasi nilai Pancasila: Nilai-nilai Pancasila seperti kebersamaan, demokrasi, dan keadilan diwujudkan dalam berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, metode, dan bahan ajar. Misalnya, Pancasila, sebagai alat untuk menyatukan bangsa Indonesia, menjadi negara moral dan agama yang diisi dengan nilai-nilai ilahi dan kemanusiaan.
2. Pengembangan dan Dinamika: Konsep ini memerlukan penyesuaian dan pengembangan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi, yang menuntut orientasi ke arah kualitas, daya saing, dan persaingan, menuntut bahwa rakyat Indonesia memiliki karakter kompetitif, dinamis, progresif, dan superior yang disertai dengan ketekunan dalam menunjukkan identitas bangsa.

c. Bidang Sosial Budaya

1. Implementasi nilai Pancasila: Nilai-nilai Pancasila seperti kebersamaan, demokrasi, dan keadilan diwujudkan dalam berbagai aspek sosial budaya, seperti budaya, tradisi, dan kebiasaan. Contohnya, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, menjadi negara bermoral dan religius yang sarat nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
2. Pengembangan dan Dinamika: Konsep ini memerlukan penyesuaian dan pengembangan



dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi, yang menuntut orientasi ke arah kualitas, daya saing, dan persaingan, menuntut bahwa rakyat Indonesia memiliki karakter kompetitif, dinamis, progresif, dan superior yang disertai dengan ketekunan dalam menunjukkan identitas bangsa.

d. Bidang Politik

1. Implementasi nilai Pancasila: Nilai-nilai Pancasila seperti kebersamaan, demokrasi, dan keadilan diwujudkan dalam berbagai aspek politik, seperti sistem pemerintahan, politik luar negeri, dan politik domestik. Misalnya, Pancasila, sebagai alat untuk menyatukan bangsa Indonesia, menjadi negara moral dan agama yang diisi dengan nilai-nilai ilahi dan kemanusiaan.
2. Pengembangan dan Dinamika: Konsep ini memerlukan penyesuaian dan pengembangan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi, yang menuntut orientasi ke arah kualitas, daya saing, dan persaingan, menuntut bahwa rakyat Indonesia memiliki karakter kompetitif, dinamis, progresif, dan superior yang disertai dengan ketekunan dalam menunjukkan identitas bangsa.

Dengan demikian, implementasi konsep *Darul Ahdi Wa Syahadah* di berbagai bidang di Indonesia bertujuan untuk memberikan bimbingan, menegaskan komitmen Islam dan Indonesia, dan memberikan tanggungan ideologi dalam menghadapi berbagai tantangan dan pemahaman agama yang beragam.

5. Perbandingan dengan konsep lain

Darul' Ahdi Wa Syahadah dan *Dar al-Islam* adalah dua konsep penting dalam tradisi hukum dan pemikiran politik Islam, yang menggambarkan hubungan antara umat Islam dan negara tempat mereka tinggal. Keduanya memiliki sejarah, latar belakang, dan implikasi yang berbeda bagi umat Islam.

Darul' Ahdi Wa Syahadah, yang secara harfiah berarti "Wilayah Perjanjian dan Kesaksian," adalah konsep yang lebih modern dan mencerminkan situasi di mana umat Islam tinggal di negara-negara yang tidak menerapkan hukum syariah sebagai hukum negara. Konsep ini menawarkan pandangan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kehidupan di masyarakat multikultural dan pluralistik. Sedangkan *Dar al-Islam*, yang secara harfiah berarti "Wilayah Islam," adalah konsep klasik yang telah ada sejak masa awal Islam. Wilayah ini didefinisikan sebagai tempat di mana hukum Islam (syariah) diterapkan dan umat Islam dapat menjalankan ajaran agama mereka dengan aman dan bebas. *Dar al-Islam* meliputi semua negara yang tampak di dalamnya hukum-hukum Islam atau yang penduduk Muslimnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Jadi termasuk ke dalam kategori *dar al-Islam*, negara yang semua atau sebagian besar penduduknya terdiri dari kaum Muslimin, semua negeri yang dikuasai dan diperintah oleh kaum Muslimin walaupun sebagian penduduknya tidak terdiri dari kaum tersebut. Demikian juga termasuk bilangan *dar al-Islam*, negeri yang diperintah dan dikuasai oleh non-Muslim selama kaum Muslimin yang berada di dalamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam (Anshor, A. M. 2013).

6. Tantangan dan Solusi

Implementasi konsep *Darul 'Ahdi Wa Syahadah* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keberagaman masyarakat, perbedaan pemahaman tentang syariah, masalah



ekonomi dan sosial, hingga politik identitas. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi konsep ini adalah pluralisme dan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan bernegara sering kali menghadapi tantangan karena harus sejalan dengan prinsip-prinsip kebhinekaan. Konflik kepentingan antara kelompok agama yang berbeda atau bahkan di antara sesama umat Islam dapat menyebabkan ketegangan sosial.

Semua tantangan yang terjadi semua bisa diatasi tentunya dengan pendekatan yang tepat, seperti membangun dialog antaragama, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pencegahan politik identitas yang memecah belah, dan penguatan peran ulama, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Melalui usaha bersama, umat Islam dapat hidup dalam perjanjian dengan negara dan memberikan kesaksian terhadap nilai-nilai keadilan, moralitas, dan perdamaian, sesuai dengan prinsip *Darul 'Ahdi Wa Syahadah*.

Kesimpulan

Muhammadiyah menetapkan Negara pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*. Konsep ini dibentuk atas tiga hal, *pertama*, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa, secara ideologis belum merumuskan secara eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai konsep Negara Pancasila. *Ketiga*, ada sebuah pandangan yang berkembang, di mana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu sendiri. Tugas sejarah bangsa Indonesia adalah bagaimana menjaga dan melaksanakan pancasila secara sungguh-

sungguh dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep *darul ahdi wa syahadah* memiliki implementasi diberbagai bidang seperti hukum, Pendidikan, sosial budaya dan politik terhadap kehidupan bangsa dan bernegara.

Saran

Sebagai saran, artikel tentang implementasi konsep *darul 'ahdi wa syahadah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tahap berikutnya bisa diarahkan dalam bentuk yang lebih holistik kembali, hal ini dilakukan agar ia menemukan bentuk yang lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh semua orang khususnya dalam memberikan pemahaman lebih tentang pengimplementasi konsep *darul 'ahdi wa syahadah* dalam berbagai bidang kehidupan seperti hukum, Pendidikan, sosial budaya, dan politik. Hal tersebut bisa menjadi pedoman pemahaman yang lebih praktis sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsan dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Anshor, A. M. (2013). Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah. *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1), 53-68.
- Arif, D. B., & Aulia, S. S. (2017). Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas
- Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 206-217.
- Astutik, A. P. (2019). Wawasan Kebangsaan: Negara Pancasila Sebagai Darul 'Ahdi Wa Al Syahadah. *Umsida Press*, 1-45.



- Bachtiar, H. (2019). Dar Al-'Ahd Wa Al-Shahadah: Upaya Dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan. *Maarif*, 14(1), 67-101.
- Fink, A. (2019). Conducting research literature reviews: From the internet to paper (5th ed.). SAGE Publication
- Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 371-378.
- Habibie, A. R. (2018). Negara Pancasila Sebagai dar al-'ahdi Wa Al-Syahadah: Gagasan Bernegara Muhammadiyah Di Tengah arus Gerakan Islamisme. *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim*, 151.
- Handayani, P., Limbong, S., & Ginting, M. R. (2023). Pancasila Dalam Lintasan Sejarah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 1993-2011.
- Hidayat, U. S. (2021). *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. Nusa Putra Press.
- Hutabarat, S. A. (2023). *Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Junaedi, M., Muharram, F., & Yani, M. (2021). Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah: Internalisasi Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(1), 11-24.
- Kusumawati, Y. (2019). Perspektif Muhammadiyah Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 264-281.
- Muhammadiyah, P. P. (2013). Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai badan Hukum. *Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahnya*, Jogjakarta: Gramasurya.
- Muthmainnah, Y. (2021) Refleksi Pendidikan Pancasila, Dar al-Ahdi Wa al-Syahada, dan Islam Wasathiyah; Daya Laku (Agensi) dan Paradigma Orang Muda.
- Risdiany, H., & Dewi, D. A. (2021). Penguatan Karakter Bangsa Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 696-711.
- Suasana, E. S. (2019). *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Perspektif Muhammadiyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri SMH Banten).
- Zulfikar, I. (2019). Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Dalam Himpitan Ambiguitas Politik Dan Urgensi Uswah Politik. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 210-219.